

Judul : DPR Menjadi Lembaga Bersih Masih Dipertanyakan Netizen
Tanggal : Minggu, 31 Maret 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 12

Penyerahan Laporan LHKPN Ke KPK Paling Rendah

DPR Menjadi Lembaga Bersih Masih Dipertanyakan Netizen

Keinginan masyarakat agar DPR menjadi lembaga yang bersih dari korupsi dini-lai masih jauh. Buktinya, untuk melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saja masih lemah. Bahkan, minim sekali.

BERDASARKAN laporan dari KPK, penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke KPK berakhir Minggu (31/3) besok sangat minim. Tercatat, baru ada 250 orang alias 44,88 persen dari total 557 orang wajib lapor di DPR yang telah menyerahkan LHKPN ke KPK.

Dengan persentase seperti itu, DPR masih menjadi instansi dengan tingkat kepatuhan LHKPN terendah.

DPR harus malu dengan 51 instansi yang tingkat kepatuhannya sudah mencapai 100 persen. Instansi itu terdiri atas unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah.

"Terdapat 51 instansi yang telah melaporkan LHKPN 100 persen, yang terdiri atas unsur DPRD provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah. Selain itu,

terdapat 85 instansi dengan kepatuhan lebih dari 90 persen. KPK sangat mengapresiasi kepatuhan tersebut dan semoga dapat menjadi contoh untuk instansi lain," beber Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, kemarin.

Kendati begitu, KPK menyatakan bakal membuka unit pelayanan pendaftaran LHKPN di hari Sabtu dan Minggu pada pukul 08.00 WIB-14.00 WIB untuk memberi kesempatan kepada pihak yang ingin melaporkan LHKPN di dua hari terakhir ini. Selain itu, pelaporan juga bisa dilakukan secara daring lewat e-LHKPN.

"Jadi silakan bagi para penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN sampai saat ini, dapat memanfaatkan layanan tersebut. Kami sampaikan kembali, mengisi dan memperbarui LHKPN sekarang jauh lebih mudah, tinggal membuka elhkn.kpk.go.id dan masuk

menggunakan akun yang sudah ada. Jika belum ada akun, dapat menghubungi bagian LHKPN atau administrasi LHKPN di instansi masing-masing," ujarnya.

Rendahnya keinginan anggota DPR untuk melaporkan LHKPN ke KPK tentu saja menjadi sorotan warganet. Banyak yang menduga jika keengganan untuk melaporkan karena ingin menyembunyikan hartanya.

"Mungkin pada mau ngumpetin harta yang nggak jelas asal usulnya. Kalau halal nggak mungkin takut. Tapi, kalau pada malas bisa dipidanain saja," duga akun Abu Bakar.

Akun @encus mengatakan, malasnya anggota dewan untuk melaporkan harta kekayaan ke KPK menjadi catatan bagi masyarakat agar tidak lagi memilihnya di pemilu mendatang. "Jangan pilih caleg yang tidak melaporkan harta dan kekayaannya," desaknya.

Akun @Pumama memuji sikap KPK yang tegas mendesak agar melaporkan hartanya. "KPK keren... Lapor LHKPN sekarang lebih mudah, sama dengan lapor pajak. Semua dokumen bisa di-upload juga. Kalau masih ada yang belum

lapor, alasannya apa ya," kata dia.

Sementara, Triantono menganggap lapor atau tidak lapor LHKPN tidak masalah karena tidak ada sanksinya. "Apakah tidak lapor LHKPN ada pengaruh jabatan sekarang ?? Ngapain ada batasan waktu Lapor?" katanya.

Antek antek menyambar. Kata dia, yang tidak lapor LHKPN tidak akan berpengaruh apa-apa. "Emank kalau ga lapor LHKPN KPK mau apa?" dia mempertanyakan.

Lebih tegas, @taufik_ok mendesak kepada KPK untuk mengumumkan nama-nama pejabat yang tidak mau melaporkan kekayaannya. "Semoga dirilis nama pejabat yang belum melaporkan LHKPN," dia mengharapkan.

Akun @ophunkdoank menduga banyak pejabat yang enggan melaporkan karena tidak sanksinya apabila melewati batas waktu akhir ternyata LHKPN belum dilaporkan. "Tak ada sanksi."

Apalagi, dikuatkan @tanjung_nuzul di dalam UU tidak mengharuskan menyerahkan LHKPN. Jadi tinggal pribadi anggota dewan untuk menyerahkan secara sukarela LHKPN. ■ REN